



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/2665501

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 256108093433000
A.2 NIP/ NRP : 197009022000032001
A.3 NAMA : Teti Sri Mulyati
A.4 PANGKAT/ GOL : III/b / Penata Muda Tk.I
A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana
A.6 JENIS KELAMIN : ☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN
A.7 NIK : 3215254209700001
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

TK / 0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	61.379.000
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1.013.880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2.590.820
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	54.823.300
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	119.807.000
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	5.990.350
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.502.718
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	8.493.068
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	111.313.932
15.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	111.313.932
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	57.313.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2.865.650
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	2.865.650
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	2.865.650
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	2.865.650
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 000148965017000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 451005
D.4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : Denny Hariman Ritonga, S.Sos
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi &

Pengaduan: (021) 1500200

informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : **BPE-**
BPE : **39456/CT/KPP.2204/2026**
Tanggal : 18 Februari 2026

NPWP : 3215254209700001
Nama :
Wajib : TETI SRI MULYATI
Pajak :

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun :
Pajak : 2025

Masa :
Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal :
Terima : 18 Februari 2026
SPT :